

KAJIAN PERANAN SERTIFIKASI BENIH PADA USAHA PENANGKARAN BENIH DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN DI BENGKULU

STUDY OF THE ROLE OF SEED CERTIFICATION IN SEED NURSERY BUSINESS IN SUPPORTING DEVELOPMENT IN BENGKULU

Eddy Sugiarto¹⁾ dan Tatik Raisawati^{2)*}

¹⁾Pensiunan Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu
Jl. Ir. Rustandi Sugianto

²⁾Program Studi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Ratu Samban Jl. Jenderal
Sudirman No. 87 Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara

*Korespondensi e-mail : traisawati@yahoo.com

ABSTRAK

Terdapat kecenderungan penurunan penggunaan benih bersertifikat, hal ini disebabkan adanya kecenderungan penurunan anggaran pemerintah yang dialokasikan pada sektor pendistribusian benih (bibit) perkebunan, sehingga praktis usaha penjualan benih banyak ditopang dari pangsa pasar non anggaran pemerintah. Rendahnya daya serap pasar benih bersertifikat dikarenakan beberapa faktor, yaitu : (1) Kesadaran masyarakat tentang mutu benih relatif rendah dan berdasarkan data perhitungan pendistribusian benih pada tahun 2010 penggunaan benih palsu dimasyarakat mencapai 60%, (2) Maraknya peredaran benih palsu dengan berbagai modus operandinya, (3) Minimnya jumlah pengusaha penangkaran benih bersertifikat, dan disamping itu (4) Harga benih bersertifikat relatif lebih tinggi bagi masyarakat pemula yang berusaha dibidang perkebunan. Usaha penangkaran benih bersertifikat cukup potensial dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penarikan bea retribusi dari kegiatan sertifikasi benih perkebunan selama ini didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 329 tahun 2001. Pengutipan retribusi dari sertifikasi benih bukan merupakan investasi langsung dari masyarakat dan disamping itu berperan untuk menekan peredaran benih ilegal (palsu), serta mendukung kemudahan masyarakat petani pekebun untuk mencari benih yang berkualitas.

Kata kunci : sertifikasi, benih, pembibitan, benih palsu

ABSTRACT

There is a downward trend in the use of certified seeds, this is due to a downward trend in the government budget allocated to the sector for distributing seeds (seeds) for plantations, so that practically the business of selling seeds is supported by the non-budgetary market share. The low absorption capacity of the certified seed market is due to several factors, namely: (1) Public awareness about seed quality is relatively low and based on data on the calculation of seed distribution in 2010 the use of seeds illegitim in the community reached 60%, (2) The widespread circulation of illegitim seeds with its various modus operandi, (3) The minimum number of certified seed breeding entrepreneurs, and in addition (4) The price of certified seeds is relatively higher for beginners who are engaged in plantations. Certified seed breeding business is quite potential in increasing Regional Original Income (PAD). The collection of user fees from plantation seed certification activities has so far been based on the Bengkulu Governor's Decree No. 329 of 2001. Quoting fees from seed certification is not a direct investment from the community and besides that it plays a role in suppressing the circulation of illegitimate (fake) seeds, as well as supporting the convenience of farming communities. planters in search of quality seeds.

Keywords : certification, seed, nursery, illegitim

PENDAHULUAN

Propinsi Bengkulu didalam perkembangan ekonominya banyak ditopang dari kehidupan masyarakat petani pekebun, secara faktual hal ini dapat dilihat dari perputaran ekonomi pada suatu daerah seperti di Ketahun dan Penarik, meskipun bukan sebagai ibu kota kabupaten namun geliat ekonomi pada kedua daerah tersebut sangat terasa dengan daya beli masyarakatnya yang cukup baik karena

ditunjang dari sektor perkebunan. Potensi perkembangan ekonomi dari sektor perkebunan sebenarnya masih dapat ditingkatkan dengan cara memperbaiki beberapa faktor seperti (1) material bahan tanam, (2) sistim pengelolaan petani dan (3) menekan penggunaan benih (palsu) asalan. Perbaikan material bahan tanam telah dilakukan oleh lembaga pusat penelitian dengan dikeluarkannya beberapa varietas atau klon unggul.

Tabel 1. Ketersediaan varietas unggul dan produktivitas perkebunan rakyat

No	Komoditi	Varietas	Produktivitas		
			Realita (Kg/Ha)	%	Normal (kg/Ha)
1	Karet	15	600	20	1.500
2	Kelapa Sawit	30	2.500 / CPO	62,5	4.000 / CPO
3	Kopi	20	500	17,8	2.800
4	Kakao	9	600	30	2.000
5	Lada	7	500	14,28	3.500

Sumber : Direktorat Perbenihan Ditjend Perkebunan, 2009

Rendahnya potensi dengan realita produktivitas beberapa komoditi perkebunan disebabkan karena lambannya proses transformasi penyerapan atau adopsi dari hasil penelitian pada petani pekebun khususnya perkebunan rakyat, disamping itu kendala jarak antara pusat penelitian dan produksi benih dengan wilayah pengembangan menyebabkan kesenjangan antara norma dengan realita produktivitas. Kendala yang lain, adalah penerapan sistem pengelolaan petani usaha perkebunan rakyat belum sesuai dengan kaidah/norma teknis atau belum diterapkannya *good management practices*, terutama dalam penggunaan input produksi (pupuk) dan kultur teknis yang

dilakukan. Keragaan tanaman karena tidak sesuai dengan kaidah teknis disajikan pada Gambar 1.

Penggunaan benih ilegitim (asalan/palsu) merupakan salah satu faktor penyebab rendahnya produktivitas perkebunan rakyat, hal ini terbukti pada pertanaman kelapa sawit karena kelapa sawit merupakan benih hasil hibridisasi atau persilangan, sedangkan pada komoditi karet masih banyak ditemukan penggunaan benih yang berasal dari seedling, sehingga berdampak pada umur panen dan rendahnya produktivitas. Keragaan tanaman karena penggunaan benih ilegitim seperti tampak pada Gambar 2.



Gambar 1. Kondisi penunasan perkebunan rakyat di desa Suka Makmur Kec. Giri Mulya Kabupaten Bengkulu utara, a) sesuai standar 40-48, b) tidak sesuai standar < 30.

Berdasarkan gambar diatas tampak pada pertanaman tidak menghasilkan buah dikarenakan aborsi, sehingga petani enggan untuk melakukan perawatan lebih lanjut dan disisi lain terdapat pertanaman dengan tingkat produksi yang tidak optimal

keduanya disebabkan oleh penggunaan benih ilegitim dimasyarakat petani pekebun yang umumnya relatif awam dengan teknologi benih yang telah berkembang cukup pesat dewasa ini.



Gambar 2. Keragaan tanaman yang berasal dari benih ilegitim (palsu) pada perkebunan rakyat di desa Suka Makmur Kec. Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara

PERKEMBANGAN USAHA PENANGKARAN BENIH PERKEBUNAN

Keberadaan usaha perbenihan disamping sebagai penyedia benih siap tanam juga sebagai agent development dalam bidang penyebaran teknologi (varietas unggul) yang dihasilkan oleh lembaga penelitian kepada masyarakat. Usaha

penangkaran benih belum tumbuh dan berkembang sebagaimana yang diharapkan mengingat pola pikir masyarakat petani pekebun beranggapan semua benih sama, disamping itu daya beli bagi petani pemula yang akan berusaha dibidang perkebunan sangat terbatas.

Pangsa pasar dari usaha penangkaran benih pada umumnya mengandalkan pangsa pasar dari petani yang sudah memiliki kebun dan bermaksud untuk memperluas usahanya, pekebun yang sudah memahami dan memiliki pengalaman tentang penggunaan benih ilegal (palsu), serta pangsa pasar dari

pengadaan benih dari pemerintah. Meskipun dihadapkan pada situasi ketidakpastian, usaha penangkaran benih telah memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan perkebunan melalui perbaikan bahan tanam benih unggul yang dipergunakan oleh masyarakat.

Tabel 2. Rekapitulasi penangkaran benih kelapa sawit di Propinsi Bengkulu

No	Pemilik	Umur tanaman (bln)	Jumlah Tanaman (btg)	Lokasi Pembibitan	Keterangan
1	CV. Meili	20 - 23	113.573	Kuro Tidur	Waralaba
2	CV. Nur Wahid	19 - 23	50.000	Taba Lagan	Waralaba
3	UPK. Tanipar Mandiri	9 - 17	47.422	Kota Bengkulu	
4	UPK. Budi Luhur	8 - 13	9.071	Kota Bengkulu	Waralaba
5	UPK. Kemat	15 - 18	41.175	Napal Putih	
6	Yayasan Baptis	14	2.050	Benteng	
7	PT. Agromuko	17 - 18	76.252	Muko-muko	
8	PT. Agricinal	18 - 27	601.117	Ipuh	
Jumlah			940.660		

Sumber : BP2MB, 2011

Berdasarkan kondisi tersebut diatas terdapat benih kelapa sawit sebanyak 940.660 batang yang sudah dalam kondisi siap tanam, bilamana asumsi bea benih dan pemeliharaan sampai dengan umur 12 bulan Rp.18.900,- per batang maka terdapat nilai investasi sebesar Rp.17.778.474.000,- dalam kondisi belum ada kepastian penyalurannya.

Dalam rangka mengeliminir peredaran benih ilegal maka Direktorat Jenderal Perkebunan meluncurkan program Waralaba Benih, yaitu meminta para produsen benih untuk menggandeng mitra di daerah pengembangan dengan persyaratan pembayaran lunak satu tahun atau setelah benih terjual. Program ini pada dasarnya adalah memberi penguatan para penangkar benih guna mengurangi permodalan awal yang dibutuhkan pada usaha tersebut, sehingga dengan program ini diharapkan dapat meningkatkan animo masyarakat untuk

berusaha di bidang perbenihan.

PERANAN SERTIFIKASI BENIH

Usaha penangkaran benih selain berperan sebagai penyedia benih bermutu guna mendukung produktivitas di bidang perkebunan, juga sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penarikan bea retribusi dari kegiatan sertifikasi benih perkebunan didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 329 tahun 2001, dasar penarikan ini adalah PP No. 49 tahun 2002 dan telah diperbaharui menjadi PP No.7 tahun 2004 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari penerimaan sektor Departemen Pertanian. Penarikan retribusi dari sertifikasi yang dilakukan dengan memperhatikan pembagian dengan daerah dimana lokus sertifikasi dilakukan dengan harapan semua pihak yang terlibat akan berupaya mendorong penggunaan benih unggul (bersertifikat) sehingga diharapkan

akan meningkatkan produktifitas perkebunan yang akhirnya akan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan masyarakat.

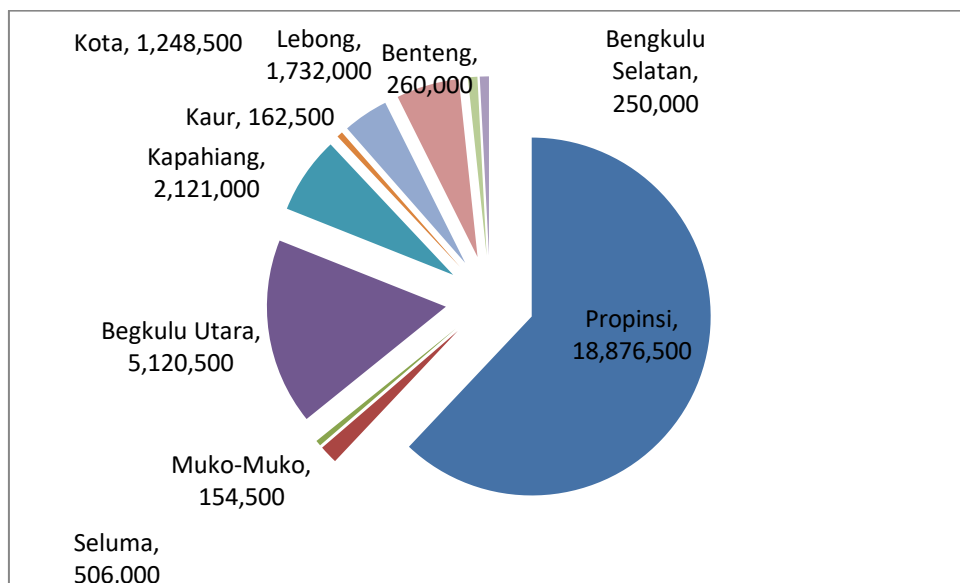
Besaran bea sertifikasi yang harus dibayarkan adalah sebagai berikut.

Tabel 2. Penarikan PNBP dan usulan perda retribusi sertifikasi bibit tanaman perkebunan

Jenis Penerimaan	Satuan	Dasar Penerimaan PNBP			
		PP no 7, 2004	SK Gub 329 (tarif lama)	Usulan Kenaikan	Usulan Tarif Perda
		 Rp	 Rp	 %	 Rp....
1. Pemeriksaan lapangan pembibitan karet	Bibit/batang	5	15	20	18
2. Pemeriksaan lapangan pembibitan kelapa sawit	Bibit/batang	15	25	20	30
3. Pemeriksaan lapangan pembibitan kakao	Bibit/batang	5	10	20	12
4. Pemeriksaan lapangan pembibitan kopi	Bibit/batang	5	10	20	12
5. Pemeriksaan lapangan pembibitan lada	Bibit/batang	5	5	20	6

Berdasarkan tabel diatas terdapat kenaikan rarif sebesar 20 % dari tarif lama. Sesuai SK Gubernur Bengkulu Bengkulu No. 329 tahun 2001, perolehan PAD dari penarikan sertifikasi benih didistribusikan kepada Daerah Tingkat II mengingat urusan perbenihan pada dasarnya sudah diserahkan kepada kabupaten dengan komposisi

Propinsi : Kabupaten = 60 % : 40 %. Melalui distribusi tersebut diharapkan terjadinya peningkatan pertumbuhan usaha penangkar benih di setiap kabupaten, disamping itu berperan untuk menekan peredaran benih ilegal (palsu), serta mendukung kemudahan masyarakat petani pekebun untuk mencari benih yang berkualitas.

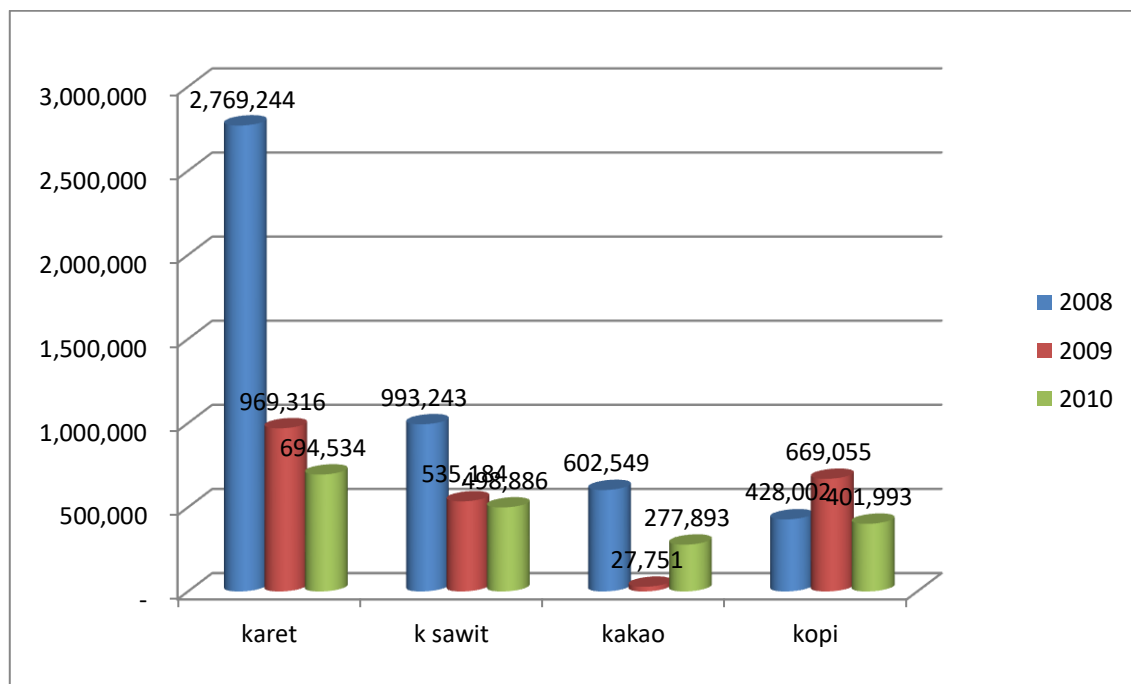


Gambar 3. Distribusi perolehan PAD dari sektor sertifikasi benih perkebunan tahun 2010 (Sumber : BP2MB, 2010)

Gambar 3 menunjukkan Kabupaten Bengkulu Utara memperoleh pembagian hasil sertifikasi (PAD) yang terbesar dibandingkan dengan daerah lain, hal ini disebabkan usaha penangkaran benih karet sudah mulai tumbuh di Kabupaten Bengkulu Utara, sehingga untuk setiap pengadaan benih karet bagi Propinsi Bengkulu banyak disuplai dari Kabupaten Bengkulu Utara tepatnya di Kecamatan Padang Jaya. Peringkat terbesar kedua adalah Kabupaten Kepahiang, hal ini disebabkan pada tahun

2010 terdapat banyak pengadaan benih kopi dan kakao yang dilakukan di Kabupaten Kepahiang.

Purba *et.al.*,(2009) dari Pusat Penelitian Kelapa Sawit Medan menyatakan produktivitas perkebunan kelapa sawit rakyat umumnya rendah. Rendahnya tingkat produktivitas ini dikarenakan maraknya penggunaan benih palsu dimasyarakat yang harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan benih bersertifikat.



Gambar 4. Grafik penggunaan benih bersertifikat pada komoditi karet, kelapa sawit, kakao dan kopi di Propinsi Bengkulu pada tahun 2008 s.d 2010 (Sumber : BP2MB, 2010)

Berdasarkan grafik di atas maka terdapat kecenderungan penurunan penggunaan benih bersertifikat, hal ini disebabkan adanya kecenderungan penurunan anggaran pemerintah yang dialokasikan pada sektor pendistribusian

benih (bibit) perkebunan, sehingga praktis usaha penjualan benih banyak ditopang dari pangsa pasar non anggaran pemerintah. Rendahnya daya serap pasar benih bersertifikat dikarenakan beberapa faktor, (1) Kesadaran masyarakat tentang mutu benih

relatif rendah dan berdasarkan data perhitungan pendistribusian benih pada tahun 2008 penggunaan benih palsu (ilegitim) dimasyarakat mencapai 60%, (2) Maraknya peredaran benih palsu (ilegitim) dengan berbagai modus operandinya, (3) Minimnya jumlah pengusaha penangkaran benih bersertifikat, dan disamping itu (4) Harga benih bersertifikat relatif lebih tinggi

bagi masyarakat pemula yang berusaha dibidang perkebunan (Sugiarto, 2009).

Berdasarkan hasil pengawasan pada awal tahun 2011 pada 3 kabupaten Muko-muko, Seluma dan Bengkulu Selatan ditemukan adanya peredaran benih ilegitim yang siap untuk dipergunakan sebagai bahan tanam dimasyarakat dengan data sebagai berikut :

Tabel 3. Hasil pengawasan peredaran benih kelapa sawit dimasyarakat.

No	Kabupaten	Jumlah		
		Orang	Batang	Ha
1	Muko –muko	24	16.830	134,64
2	Seluma	82	15.873	126,98
3	Bengkulu Selatan	148	45.848	366,78

Sumber : BP2MB, 2011

KESIMPULAN

1. Sertifikasi benih secara langsung berdampak pada PAD.
2. Usaha penangkaran benih bersertifikat secara tidak langsung mengeliminir usaha benih ilegitim dan berdampak terhadap penyerapan lapangan kerja serta mampu menggerakkan perputaran ekonomi suatu wilayah.
3. Perlu adanya proteksi terhadap usaha penangkaran benih bersertifikat dan diperlukan adanya sinergi dengan pihak kabupaten guna menumbuhkan kembangkan usaha berbenihan.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih. 2010. Data Sertifikasi Benih Perkebunan Propinsi Bengkulu Tahun 2010. BP2MB Dinas Perkebunan Propinsi Bengkulu. Bengkulu.

..... 2011. Data Sertifikasi Benih Perkebunan Propinsi Bengkulu Tahun 2011. BP2MB Dinas Perkebunan

Propinsi Bengkulu. Bengkulu.

Direktorat Perbenihan Ditjend Perkebunan. 2009. Ketersediaan Varietas Unggul dan Produktivitas Perkebunan Rakyat. Ditjenbun. Jakarta.

PP nomor 7 tahun 2004. Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Purba, A.R., Suprianto, E., Supena, N., Arif, M. 2009. *Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit dengan Menggunakan Bahan Tanaman Unggul*. Prosiding Pertemuan Teknis Kelapa Sawit 2009 : Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Menuju *Sustainable Palm Oil*. Jakarta Convention Center 28-30 Mei 2009. PPKS. Medan. Hal : 1-14

Sugiarto, E. 2009. *Upaya Mencegah Peredaran Benih Kelapa Sawit Palsu di Bengkulu*. Prosiding Pertemuan Teknis Kelapa Sawit 2009 : Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit Menuju *Sustainable Palm Oil*. Jakarta Convention Center, 28-30 Mei 2009. PPKS. Medan. Hal : 15-19.

Surat Keputusan Gubernur Bengkulu nomor 329 tahun 2001. Tentang Retribusi Bibit

Tanaman Perkebunan. Pemerintah
Daerah Propinsi Bengkulu.